

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Timor-Leste, sebagai negara termuda di Asia Tenggara, mengajukan keanggotaan penuh ASEAN pada tanggal 4 Maret 2011. Menteri Luar Negeri Timor-Leste, Zacarias da Costa menyampaikan langsung keinginan tersebut kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, selaku Ketua ASEAN periode 2011. Timor-Leste berharap jika proses ini dapat berjalan dengan cepat dan lancar sesuai yang diungkapkan oleh Presiden Ramos-Horta, “...*we wish to join ASEAN in the possible shortest time*” (Embassy of Malaysia, Dilli, 2009).

Negara anggota ASEAN memiliki tanggapan yang berbeda dalam menanggapi keinginan Timor-Leste untuk bergabung dengan ASEAN. Sembilan negara menyetujui dan mendukung keanggotaan Timor-Leste dalam ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan, Singapura sendiri belum menyetujui keanggotaan Timor-Leste. Singapura menyatakan jika Timor-Leste belum siap untuk menyesuaikan diri dengan berbagai macam tantangan dan kompleksitas jika menjadi anggota penuh ASEAN. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian menyebabkan konsensus terkait keanggotaan Timor Leste tidak kunjung tercapai.

Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, pada *ASEAN Leaders Retreat Summit* 2011 di Nusa Dua, Bali, Indonesia mempertanyakan urgensi bergabungnya Timor-Leste di ASEAN. Sebagaimana dikatakan oleh Lee, “...*why*

*Timor-Leste was on agenda and what was so special about the country? Adding that Fiji and Papua New Guinea also expressed interest but never received genuine attention”* (The Jakarta Post, 2011). Lee juga mempertanyakan apakah Timor-Leste dapat memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Piagam ASEAN bagi suatu negara untuk menjadi anggotanya. Bergabungnya Timor-Leste dengan ASEAN dikhawatirkan akan memengaruhi stabilitas dan keamanan organisasi kawasan tersebut (The Diplomat, 2011).

Presiden Ramos-Horta menyatakan bahwa Timor-Leste telah siap dan layak untuk bergabung dengan ASEAN. Berbagai kekurangan yang dialamatkan kepada Timor-Leste telah diupayakan oleh pemerintah agar Timor-Leste segera masuk menjadi anggota ke-11. Hal ini dapat dilihat dari berbagai laporan organisasi internasional mengenai Timor-Leste yang dirangkum dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1.1 Perbandingan Indikator Timor-Leste pada tahun 2011 dan 2022**

| <b>Indikator</b>                   | <b>2011</b>     | <b>2022</b>     |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Indeks Pembangunan Manusia         | 0,495           | 0,607           |
| PDB per kapita <sup>1</sup> (2021) | USD 936,6       | USD 2.741,4     |
| PDB <sup>2</sup>                   | USD 1,04 miliar | USD 1,99 miliar |
| Rasio Hutang terhadap PDB          | -               | 14,08%          |

Sumber: data dari berbagai sumber, data diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Timor-Leste mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2011, IPM berada pada skor 0,495 dan termasuk ke dalam kelompok *low human development*.

<sup>1</sup> Produk Domestik Bruto per kapita adalah nilai seluruh produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu tahun, dibagi dengan rata-rata jumlah penduduk pada tahun yang sama.

<sup>2</sup> Produk Domestik Bruto adalah total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu

Sedangkan tahun 2022, skor IPM mengalami kenaikan menjadi 0,607 dan masuk dalam jajaran *medium human development*, berada di peringkat 140 setara dengan Laos dan di atas Kamboja dan Myanmar (UNDP, 2022). Secara finansial, PDB per kapita Timor-Leste juga mengalami kenaikan terlihat pada tahun fiskal 2011 sebesar 936,6 dollar AS menjadi 2.741,4 di tahun 2021 (World Bank, 2023). Angka ini menempatkan Timor-Leste berada di atas Myanmar. Sedangkan PDB Timor-Leste tahun 2011 sebesar 1,04 miliar dolar AS mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 1,99 miliar dolar AS (IMF, 2022).

Data dari *International Monetary Fund* (2022) memperlihatkan rasio hutang terhadap PDB Timor-Leste sebesar 14,08%. Angka ini memperlihatkan pemerintah Timor-Leste tidak memiliki hutang yang besar dan menunjukkan nilai positif dalam hal perekonomian. Dalam isu domestik, Timor-Leste tidak memiliki konflik SARA, kejahatan terorganisasi, dan pemberontakan bersenjata, seperti beberapa negara lainnya di kawasan. Timor-Leste juga menempati posisi ke-44 terkait Indeks Kebebasan Demokrasi tahun 2022. Peringkat ini menempatkan Timor-Leste pada peringkat kedua di antara negara Asia Tenggara, berada di bawah Malaysia dan bahkan di atas sembilan negara anggota ASEAN lainnya (The Economist, 2022). Perkembangan yang diraih oleh Timor-Leste berdasarkan data di atas, tetap tidak mengubah keputusan Singapura terkait isu keanggotaan baru di ASEAN. Terlihat hingga Januari 2023, konsensus keanggotaan Timor-Leste tidak juga menunjukkan hasil yang positif.

Bagai dua sisi mata uang, memasukkan Timor-Leste sebagai negara anggota ASEAN tidak selalu memberikan dampak negatif. Menurut Martinez-

Galan (2021), kontribusi yang diberikan oleh Timor-Leste jika bergabung menjadi anggota ke-11 ASEAN adalah sebagai berikut: pertama, kehadiran geografis dan akses yang lebih besar di kawasan. Kedua, perluasan perdamaian dan stabilitas di seluruh kawasan Asia Tenggara. Ketiga, kontribusi Timor-Leste dalam pertumbuhan kawasan, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya. Keempat, akses dan koneksi yang semakin luas dan inklusif dengan negara-negara di seluruh dunia karena Timor-Leste adalah negara anggota dari *Lushopone/Community of Portuguese Language Countries*<sup>3</sup>. Kelima, pertumbuhan pasar yang signifikan untuk investasi di kawasan, terutama di bidang perminyakan dan pertambangan. Keenam, menjadi ‘*additional firewall*’ untuk mencegah kekuatan di kawasan dan/atau dunia memiliki pengaruh yang berlebih di kawasan Asia Tenggara.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas sikap Singapura terhadap keanggotaan baru Timor-Leste di ASEAN. Pertama, Prameswari (2017), melalui skripsi dengan judul “Penyebab Penolakan Singapura terhadap Konsensus Keanggotaan Timor Leste di ASEAN”, menganalisis kebijakan Singapura menggunakan teori interdependensi struktural dan globalisasi dan teori pilihan rasional. Berdasarkan analisis tersebut, Singapura cenderung melihat dari dampak negatif Timor-Leste di mana kondisi keterbatasan SDM menjadi perhatian tersendiri. Keterbatasan tersebut akan menghambat perkembangan kawasan dan akan menghabiskan waktu lama dan biaya yang banyak dalam membantu Timor-Leste mengejar ketertinggalan. Kedua, skripsi dengan judul “Analisis

---

<sup>3</sup> Organisasi multilateral yang berfokus pada kerjasama dan pengembangan budaya, ekonomi, dan politik di antara negara pengguna bahasa Portugis di dunia. Organisasi ini beranggotakan sembilan negara dan 32 negara pengamat serta berkantor pusat di Lisbon, Portugal,

Perbandingan Sikap Indonesia dan Singapura terhadap Keinginan Timor-Leste menjadi Anggota ASEAN” yang ditulis oleh Gharby Saidi membahas perbandingan tanggapan Indonesia dan Singapura mengenai keanggotaan baru di ASEAN. Penelitian deskriptif ini menggunakan teori pembuatan keputusan yang dipopulerkan oleh William Coplin. Menurut Saidi (2019), perbandingan sikap antara kedua negara dipengaruhi oleh kondisi politik domestik, kondisi ekonomi dan militer, serta kondisi internasional. Ketiga, Umarach melalui tulisannya “Alasan Singapura Belum Menyetujui Keanggotaan Timor Leste di ASEAN tahun 2011-2017” menggunakan teori pengambilan keputusan dan konsep kepentingan nasional dalam membahas kebijakan Singapura. Penelitian ini menganalisis faktor yang memengaruhi Singapura dalam mengambil keputusan. Umarach (2019) berpendapat bahwa penolakan Singapura disebabkan oleh kekhawatiran terhadap masuknya Timor-Leste ke ASEAN akan mengganggu kondisi domestik Singapura.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis respon Singapura terhadap pengajuan keanggotaan penuh Timor-Leste di ASEAN dari tahun 2011 hingga 2022. Melihat perkembangan yang sudah ditunjukkan oleh Timor-Leste yang ditanggapi oleh Singapura dengan sikap yang konsisten. Peneliti menggunakan teori proses pembuatan keputusan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut dan model aktor rasional untuk menganalisis lebih lanjut kebijakan yang diambil oleh Singapura.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“mengapa Singapura tidak setuju jika Timor-Leste bergabung dengan ASEAN melihat perkembangan negara tersebut selama tahun 2011 - 2022?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### ***1.3.1 Tujuan Umum***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan kebijakan luar negeri suatu negara.

### ***1.3.2 Tujuan Khusus***

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan kebijakan yang diambil oleh Singapura terkait pengajuan keanggotaan Timor-Leste di ASEAN beserta faktor determinannya.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### ***1.4.1 Kegunaan Teoritis***

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu Hubungan Internasional, terutama mengenai analisis kebijakan luar negeri serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kebijakan luar negeri Singapura.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian-penelitian yang ada dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai kebijakan luar negeri suatu negara, khususnya kebijakan luar negeri suatu negara dalam organisasi internasional.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Peneliti dalam menjawab rumusan masalah penelitian menggunakan dua kerangka pemikiran, yaitu teori proses pengambilan keputusan dan model aktor rasional.

### **1.5.1 Teori Proses Pembuatan Keputusan**

Teori pembuatan keputusan yang dikemukakan oleh Richard J. Snyder, Henry Bruck, dan Burton Sapin bertujuan untuk menganalisis perihal yang menjadi faktor pendorong suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Teori ini sendiri digambarkan oleh Snyder sebagai sebuah tindakan yang terencana dan memiliki tujuan (*planful/purposeful action*) (Snyder dkk, 1962). Salah satu tindakan yang terencana adalah pengambilan keputusan yang disusun oleh negara. Snyder, dkk mendefinisikan tindakan negara sebagai suatu tindakan yang diambil oleh mereka yang bertindak atas nama negara. Sebagaimana dikatakan Snyder (1967), "*the state is its decision-makers*". Selain itu, tindakan negara tidak disebabkan atau ditentukan, melainkan mengalir dengan cara terencana dan memiliki tujuan sesuai definisi dari pembuat keputusan terhadap situasi yang ada.

Pembuat keputusan dalam merancang suatu kebijakan dipengaruhi oleh situasi yang sedang terjadi. Snyder, dkk mengemukakan bahwa berbagai faktor internal dan eksternal memengaruhi perilaku politik luar negeri negara (Perwita dan Yani, 2020:64). Asumsi dasar teori ini adalah kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai keputusan yang dirancang oleh unit-unit politik domestik yang diakui, di mana pemimpin negara bertindak sebagai aktor-aktor utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Pemimpin negara yang menyusun kebijakan dapat didefinisikan sebagai individu ataupun berkelompok. Snyder menyebut terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Faktor tersebut meliputi *internal setting*, *external setting*, dan *decision-making process* (Sneyder dkk, 1962:201). Penjabaran dari tiap faktor dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Internal setting* didefinisikan sebagai faktor pengaruh yang berasal dari lingkungan internal suatu negara. Pengaruh internal meliputi kondisi domestik, opini publik, dan posisi geografis. Pengalaman nasional dalam menghadapi persoalan politik internasional juga dapat memengaruhi pembuat kebijakan.
- b. *External setting* diartikan sebagai berbagai faktor dan kondisi yang berada di luar batas-batas teritorial negara. Pengaruh eksternal meliputi tindakan dari negara lain (pembuat keputusan dalam suatu negara), tanggapan masyarakat internasional, dan kondisi dunia internasional.
- c. *Decision-making process* didefinisikan sebagai faktor yang berpengaruh selama proses pengambilan kebijakan berlangsung. Faktor ini dibagi

menjadi tiga kategori yang meliputi, lingkup kompetensi dari para pengambil keputusan, komunikasi dan informasi yang tersedia pada saat pengambilan keputusan, dan motivasi aktor dalam proses pengambilan keputusan, termasuk faktor psikologis dan kepribadian.

Teori proses pembuatan keputusan juga memerhatikan akan karakteristik situasional ketika proses pengambilan keputusan sedang berlangsung, seperti apakah proses pengambilan keputusan dibuat dalam situasi krisis atau tidak (Snyder dan Robinson, 1965).

### **1.5.2 Model Aktor Rasional**

Model aktor rasional merupakan suatu konsep yang menjelaskan mengenai tindakan negara dalam merumuskan kebijakan. Kebijakan dirumuskan berdasarkan situasi/kondisi dan informasi yang ada untuk menentukan kebijakan apa yang terbaik dalam mencapai tujuan. Graham T. Allison memopulerkan model aktor rasional melalui buku "*Essence of Decision*". Asumsi dari model ini adalah pemerintah sebagai pengambil keputusan bersikap rasional untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang terdefinisikan dengan baik (Allison dalam Jackson dan Sorensen, 2016: 445). Model aktor rasional digunakan untuk menjawab rumusan masalah "mengapa pemerintah mengambil kebijakan tersebut?". Unit dasar analisis model ini adalah '*policy as national choices*'. Pemerintah memilih tindakan yang akan memaksimalkan sasaran dan tujuan strategis. Negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Menurut Allison, negara dapat dengan benar

mengidentifikasi tantangan kebijakan luar negeri dan membuat keputusan terbaik yang memungkinkan dalam hal keuntungan dan biaya, memperhitungkan tujuan dan nilai negara (Jackson dan Sorensen, 2016:456). Pengambil keputusan menyusun terlebih dahulu tujuan dan sasaran dari kebijakan secara rinci. Kemudian, pengambil keputusan dapat menganalisis seluruh alternatif untuk mencapai tujuannya dan akan memilih yang dapat memberikan hasil maksimal dengan upaya yang seminimal mungkin (Latifa, 2010:60). Schelling (Allison, 1969) mengatakan bahwa perilaku rasional merupakan suatu perilaku yang membutuhkan kejelian dalam perhitungan keuntungan secara eksplisit dan juga dapat konsisten secara internal.

Allison (1969) menjelaskan bahwa terdapat empat '*organizing concepts*' dalam model aktor rasional, yaitu aktor nasional, permasalahan, alternatif kebijakan, dan tindakan sebagai pilihan rasional. Pertama, aktor nasional. Aktor nasional yang dimaksudkan dalam model ini adalah pembuat keputusan. Pemerintah berperan sebagai satu-kesatuan entitas pembuat keputusan yang rasional. Aktor memiliki suatu tujuan tertentu, serangkaian pilihan yang dirasakan, dan serangkaian perkiraan konsekuensi yang mengikuti dari setiap alternatif. Kedua, permasalahan. Tindakan yang dipilih sebagai jawaban atas masalah strategis yang dihadapi oleh negara. Ancaman dan peluang yang muncul berdasarkan situasi domestik dan internasional mendorong negara untuk bertindak. Ketiga, alternatif kebijakan. Berbagai tindakan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi merupakan sesuatu yang telah dipilih negara sebagai solusi. Tindakan negara dipahami sebagai pilihan negara dalam kondisi rasional di

antara alternatif tindakan yang tersedia. Keempat, tindakan sebagai pilihan rasional. Terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. *Goals and objectives* (tujuan dan sasaran). Keamanan nasional dan kepentingan nasional adalah kategori utama di mana tujuan strategis disusun. Negara mencari keamanan dan serangkaian objektivitas lebih jauh.
- b. *Options* (opsi). Berbagai tindakan yang relevan dengan masalah strategis memberikan berbagai macam pilihan kepada pengambil keputusan.
- c. *Consequences* (konsekuensi). Setiap alternatif tindakan akan menghasilkan serangkaian konsekuensi. Konsekuensi yang relevan merupakan manfaat dan biaya dalam hal tujuan dan sasaran strategis bagi negara.
- d. *Choice* (pilihan). Pengambil keputusan akan memilih salah satu tindakan ketika dihadapkan dengan berbagai kemungkinan. Aktor rasional memilih alternatif tindakan yang memiliki konsekuensi rendah dan memiliki manfaat bagi negara, berdasarkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan rasional merupakan suatu upaya negara untuk memaksimalkan nilai atau '*value-maximizing*'. Asumsi dasar dari perilaku pemaksimalan nilai menghasilkan proposisi yang penting bagi sebagian besar penjelasan. Prinsip umum dapat dirumuskan sebagai berikut: kemungkinan setiap tindakan tertentu dihasilkan dari kombinasi (1) nilai, tujuan, atau kepentingan negara yang relevan; (2) alternatif tindakan dari permasalahan yang ada; (3) perkiraan berbagai konsekuensi dari setiap alternatif yang tersedia; (4) penilaian dari setiap

konsekuensi yang dihasilkan. Proses pemaksimalan nilai menghasilkan dua proposisi, yaitu peningkatan biaya alternatif dan penurunan biaya alternatif. Pertama, peningkatan biaya alternatif, yaitu pengurangan nilai dari serangkaian konsekuensi yang akan mengikuti dari tindakan itu, atau pengurangan probabilitas untuk mencapai konsekuensi tetap, sehingga mengurangi kemungkinan alternatif itu dipilih. Kedua, penurunan biaya alternatif, yaitu peningkatan nilai serangkaian konsekuensi yang akan mengikuti dari alternatif itu, atau peningkatan probabilitas untuk mencapai konsekuensi tetap, sehingga meningkatkan kemungkinan tindakan tersebut dipilih.

## **1.6 Operasional Konsep**

### ***1.6.1 Definisi Konseptual***

#### ***1.6.1.1 Kebijakan luar negeri***

Kebijakan luar negeri adalah tindakan yang dirumuskan oleh para pembuat keputusan suatu negara berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam untuk menghadapi negara atau aktor internasional lainnya. Kebijakan yang dirancang merupakan suatu keputusan yang dipertimbangkan secara rasional dengan melihat konsekuensi yang dihasilkan. Keuntungan dan kerugian yang didapatkan negara menjadi dua poin penting dalam mempertimbangkan keputusan yang akan dibuat.

#### ***1.6.1.2 Aktor Rasional***

Aktor rasional adalah satu-kesatuan entitas yang merumuskan dan mengambil keputusan dalam suatu negara. Pemerintah sebagai pengambil keputusan mengambil tindakan berdasarkan alternatif yang telah

diperhitungkan secara cermat dan matang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan didasarkan atas tujuan yang telah ditentukan dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh negara.

### ***1.6.1.3 Proses Pembuatan Keputusan***

Proses pembuatan keputusan adalah serangkaian tindakan yang terencana dan memiliki tujuan dalam merancang suatu kebijakan. Selama proses berlangsung, pengambil keputusan dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan pandangannya terhadap permasalahan yang sedang terjadi.

## ***1.6.2 Definisi Operasional***

### ***1.6.2.1 Kebijakan Luar Negeri***

Kebijakan luar negeri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Singapura. Kebijakan yang diambil oleh Singapura sebagai tanggapan dari pengajuan keanggotaan baru Timor-Leste di ASEAN. Singapura mengambil tindakan untuk menolak Timor-Leste sebagai anggota baru ASEAN dari tahun 2011 hingga 2022. Tindakan ini merupakan suatu keputusan yang rasional melihat keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh Singapura dan tujuan/kepentingan nasional yang telah ditentukan.

### ***1.6.2.2 Aktor Rasional***

Aktor rasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah Singapura sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan luar negeri.

### ***1.6.2.3 Proses Pembuatan Keputusan***

Proses pembuatan keputusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura dalam membuat kebijakan luar negeri. Tindakan penolakan Singapura terkait isu pengajuan Timor-Leste sebagai anggota baru ASEAN dipengaruhi oleh faktor dalam negeri, situasi dan kondisi internasional, dan pandangan pemerintah terkait isu ini.

## **1.7 Argumen Penelitian**

Argumen utama dalam penelitian ini adalah kebijakan Singapura mengenai pengajuan keanggotaan baru Timor-Leste di ASEAN pada tahun 2011-2022 dipengaruhi oleh keputusan rasional pemerintah Singapura dalam melihat keuntungan dan kerugian yang didapatkan jika Timor-Leste bergabung dengan ASEAN. Keputusan ini dipengaruhi oleh faktor domestik Singapura, kondisi internal Timor-Leste, kondisi ASEAN terkini, dan pandangan pengambil keputusan.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

### ***1.8.1 Tipe Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi berdasarkan studi kasus. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang menjelaskan kedudukan antara variabel-variabel diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2009:7). Penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan dan pengaruh suatu variabel

terhadap variabel lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2010:4). Penulis menggunakan metode ini karena penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam terkait faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri Singapura.

### ***1.8.2 Situs Penelitian***

Situs penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan proses penelitian berupa pengumpulan informasi dan data dari objek penelitian. Penulis melakukan pengumpulan informasi dan data objek penelitian di Semarang.

### ***1.8.3 Subjek Penelitian***

Subjek penelitian, menurut Muhammad Idrus (2009), adalah benda, hal, atau individu yang berperan sebagai sumber informasi dan data terkait dengan penelitian. Pemerintah Singapura dibawah kepemimpinan PM Lee Hsien Loong merupakan subjek dari penelitian ini.

### ***1.8.4 Jenis Data***

Jenis data yang digunakan adalah teks-teks, frasa, dan tindakan-tindakan yang dilakukan dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah Singapura terkait kebijakan ketidaksetujuan terhadap keanggotaan baru Timor-Leste di ASEAN dari tahun 2011 hingga 2022.

### **1.8.5 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (Sugiyono, 2009). Data sekunder diperoleh dari pihak ketiga dimana mereka mengolah data primer dan menyajikannya kepada khalayak umum. Penulis memperoleh data-data untuk menunjang penelitian ini melalui buku, jurnal, artikel ilmiah, makalah, laporan penelitian, surat kabar, dan dokumen lainnya, baik *offline* maupun *online*, serta laman milik pemerintah, universitas, ataupun organisasi yang berkaitan dengan objek penelitian

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka. Kajian pustaka, menurut Nazir (2005), merupakan salah satu teknik pengumpulan data di mana peneliti mencari informasi dan data terkait objek penelitian dari bahan sekunder. Penulis mengumpulkan data lapangan yang bersumber dari literatur berupa buku, artikel, jurnal, makalah, surat kabar, video pidato, dan situs-situs resmi yang memuat dan menjelaskan tentang subjek dan objek penelitian.

### **1.8.7 Analisa dan Interpretasi Data**

Analisa dan interpretasi data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah upaya untuk memperjelas makna data penelitian dengan cara mengumpulkan data menurut klasifikasi tertentu. Penelitian ini menggunakan tiga langkah dalam teknik analisa data secara

kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Siyoto dan Sidik, 2015).